

Penerapan Kebijakan Retribusi Sampah Berbasis Pemilahan di Kota Makassar



Policy Brief

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar
Universitas Fajar

POLICY BRIEF

PENERAPAN KEBIJAKAN RETRIBUSI SAMPAH BERBASIS PEMILAHAN UNTUK KOTA MAKASSAR

Ringkasan Eksekutif

Kota Makassar menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah dengan volume yang mencapai 1.000-1.200 juta ton per hari dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa. Volume ini menyebabkan tekanan yang signifikan pada TPA (Tempat Pemrosesan akhir) Tamangapa yang telah beroperasi lebih dari dua dekade, mengancam kapasitas penampungan sampah kota. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kebijakan retribusi berbasis pemilahan sampah dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi hijau. Implementasi kebijakan ini perlu difokuskan pada peningkatan infrastruktur, penyuluhan masyarakat, dan penyediaan insentif ekonomi untuk mendukung perubahan perilaku.

Pendahuluan

Sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, Makassar menghadapi masalah sampah yang semakin kompleks. Sistem pengelolaan sampah saat ini tidak memadai, dengan TPA (Tempat Pemrosesan akhir) Tamangapa yang semakin terbatas kapasitasnya dan volume sampah yang terus meningkat. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah kebijakan retribusi sampah berbasis pemilahan yang memberi insentif bagi rumah tangga yang aktif memilah sampah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Temuan Utama

1. Partisipasi Masyarakat adalah Faktor Kunci

Analisis penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh paling besar terhadap keberhasilan kebijakan pengelolaan

sampah. Tingkat partisipasi saat ini masih rendah, dan memerlukan intervensi yang tepat agar menjadi kebiasaan yang konsisten.

2. Penguatan Infrastruktur Pemilahan

Infrastruktur pemilahan sampah yang memadai, seperti TPS 3R dan bank sampah, terbukti efektif dalam mendorong pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas.

3. Insentif Ekonomi Sebagai Pendukung Utama

Kebijakan fiskal berupa pengurangan biaya retribusi untuk rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah dapat menjadi insentif yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar:

1. Penyediaan dan Penguatan Infrastruktur Pemilahan Sampah

Infrastruktur pemilahan sampah yang efektif sangat penting untuk memfasilitasi masyarakat dalam memilah sampah di sumbernya. Pemerintah Kota Makassar harus memberikan prioritas dalam pembangunan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang dapat diakses oleh setiap rumah tangga. Selain itu, pengadaan fasilitas bank sampah harus diperluas, memastikan setiap kawasan memiliki tempat yang memadai untuk menampung sampah yang sudah dipilah. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya membantu dalam pengurangan volume sampah, tetapi juga mendorong keberlanjutan melalui pemanfaatan kembali material yang dapat didaur ulang.

Rencana Aksi:

- a. Alokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk pembangunan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di kelurahan-kelurahan prioritas.
- b. Dukungan terhadap pengadaan alat pemilah sederhana bagi rumah tangga dan ruang-ruang publik untuk mempercepat pemilahan sampah dari sumbernya.

- c. Bentuk Tim Pendamping Teknis dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan akademisi untuk memberikan pelatihan manajemen operasional dan pemasaran produk hasil pemilahan (kompos dan barang daur ulang).

2. Penerapan Kebijakan Retribusi Berbasis Pemilahan

Untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar lebih aktif dalam pemilahan sampah, pemerintah kota perlu menerapkan retribusi berbasis pemilahan. Rumah tangga yang secara aktif menyeter sampah yang sudah dipilah akan mendapat potongan biaya retribusi atau bahkan dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi sampah bulanan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan insentif ekonomi, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk berkontribusi pada pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Rencana Aksi:

- a. Kembangkan regulasi retribusi berbasis pemilahan yang memberi insentif atau potongan biaya bagi rumah tangga yang aktif memilah sampah.
- b. Fasilitasi kemitraan antara bank sampah dengan industri daur ulang untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan harga material yang adil.
- c. Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan ini dengan melibatkan perangkat desa dan kecamatan untuk memantau pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

3. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun budaya peduli lingkungan. Program sosialisasi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa, sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif. Pemerintah Kota Makassar harus bekerja sama dengan sekolah, komunitas, dan media untuk menyebarkan informasi terkait manfaat pemilahan sampah dan dampak positifnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain itu, insentif pendidikan dalam bentuk penghargaan bagi kelompok yang berhasil menerapkan pemilahan sampah di lingkungan mereka bisa menjadi alat yang efektif untuk mempercepat perubahan perilaku.

Rencana Aksi:

- a. Perluas kampanye publik dengan menggandeng sekolah dan komunitas untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dini.
- b. Integrasikan materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah untuk membentuk kebiasaan memilah sampah sejak anak-anak.
- c. Lakukan sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai saluran media sosial, media massa, dan kelompok ibu rumah tangga untuk mempengaruhi perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga.

Kesimpulan

Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Makassar, diperlukan pergeseran paradigma dalam sistem pengelolaan sampah yang selama ini bersifat sentralistik menjadi sistem yang partisipatif. Kebijakan retribusi sampah berbasis pemilahan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, insentif fiskal yang tepat, dan edukasi yang berkelanjutan, Kota Makassar dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efisien, berkelanjutan, dan mendukung ekonomi hijau.